

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai variabel diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak akan lepas dari adanya peran manusia dalam proses pengelolaannya, yang mana manusia disini merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara berkembang dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di berbagai daerah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya penyerapan perkapita. Jika perekonomian suatu daerah tinggi, maka akan tercipta pasar tenaga kerja yang tinggi pula.²

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur menyumbang

² Fivien Muslihatinningsih, et. All, "Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur", *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. VII No. 1, 2020, hlm. 1

hampir 15 persen produk domestik bruto nasional, nomor dua setelah DKI Jakarta. Provinsi ini adalah salah satu dari delapan Provinsi paling awal di Indonesia selain Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1950. Dasar hukum pembentukan ini kemudian diubah dengan UU 18/1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Hari jadinya ditetapkan pada 12 Oktober berdasarkan peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007. Ibukotanya terletak di Surabaya. Populasi penduduk Jawa Timur merupakan nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 40,66 juta jiwa pada tahun 2020. Berikut ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia 2020 (Orang)

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	48.274.162
2.	Jawa Timur	40.665.696
3.	Jawa Tengah	36.516.035
4.	Sumatra Utara	14.799.361
5.	Banten	11.904.562

Sumber: BPS Sensus Penduduk Indonesia 2020

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah dari suku Jawa yang menyebar hampir diseluruh wilayah Jawa Timur. Namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih ke heterogen. Umumnya suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Jawa Timur mempunyai kesenian dan kebudayaan yang khas. Salah satunya adalah kesenian Reog dan Ludruk yang sangat cukup terkenal di Jawa Timur. Selain

kesenian yang cukup mendunia, Jawa Timur juga mempunyai aneka ragam kebudayaannya. Antara lain karapan sapi yang hanya ada di wilayah Madura saja. Karapan sapi ini biasanya digunakan para petani untuk membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan dari masyarakat Madura.

Indonesia saat ini khususnya Jawa Timur telah memiliki jumlah penduduk atau jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi. Bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi tumbuh kembangnya jumlah angkatan kerja. Semakin banyak jumlah penduduk usia kerja maka juga akan menambah jumlah angkatan kerja. Maka dari itu, akan semakin banyaknya orang yang akan mencari pekerjaan dan kemungkinan juga banyak yang masih menganggur. Dengan demikian, saat ini diperlukannya adanya pembangunan ekonomi untuk memperkecil jumlah pengangguran. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan yaitu peningkatan di semua sektor. Saat ini ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja yang terus meningkat akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka dari itu, diperlukannya penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup supaya dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan penduduk. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan

pekerjaan yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Di Jawa Timur sendiri jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019 secara terus menerus, akan tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan. Penyebab menurunnya jumlah tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2020 adalah dikarenakan adanya virus Corona atau covid-19 yang akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
(Orang)

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	19,367,777
2.	2017	20,099,220
3.	2018	20,832,201
4.	2019	21,032,612
5.	2020	20,962,967

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2021 (data diolah)

Jika ditelaah kembali selama periode 2016 sampai dengan periode 2019 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2016 jumlahnya hanya 19.367.777 orang dan terus meningkat setiap tahunnya yang pada akhirnya berjumlah 21.032.612 orang di tahun 2019. Akan tetapi jumlah tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, yang awalnya di tahun 2019 berjumlah 21.032.612 orang turun menjadi 20.962.967 orang ditahun 2020. Dari perkembangan jumlah

penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Timur yang cenderung mengalami kenaikan tersebut, menjadikan minat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian akan diperoleh faktor apa saja yang seharusnya ditindaklanjuti agar dapat membantu mengatasi permasalahan tenaga kerja tersebut.

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah setiap negara tidak terkecuali Indonesia terkhusus Provinsi Jawa Timur juga melakukan reformasi terkait permasalahan tenaga kerja. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang ada agar masalah pengangguran dapat berkurang.³

Menurut Handoko, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut yaitu tingkat PDRB, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja, modal, dan pengeluaran non upah.⁴

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya angka penyerapan tenaga kerja yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional

³ *Ibid.*, hlm. 1

⁴ Andi Wijaya, et. all, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau", *Jurnal Jom FEKON*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 6

Bruto (PDRB), Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah faktor tingkat upah. Menurut Asyhadie, upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan ini setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain.⁵

Menurut Simanjuntak, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha untuk meningkatkan upah pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah sering kali diterapkan diberbagai negara yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, upah minimum adalah alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan supaya nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sisi kedua, sebagai alat proteksi bagi

⁵Andi Nurahman Ramdani, et. all, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 2014-2019", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 23 No. 2, 2021, hlm. 21

perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.⁶ Berikut ini adalah data perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2016-2020:

Tabel 1.3
Jumlah UMK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	65,648,000
2.	2017	71,128,900
3.	2018	77,324,218
4.	2019	85,663,925
5.	2020	92,954,101

Sumber: BPS Jawa Timur 2020 (data diolah)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, walaupun besarnya berbeda-beda. Peningkatan jumlah UMK dapat dilihat dari meningkatnya jumlah besaran yang awalnya di tahun 2016 sebesar Rp. 65,648,000 naik secara terus menerus hingga pada akhirnya di tahun 2020 menjadi Rp. 92,954,101.

Selain Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), faktor kedua yang juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Feriyanto, PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi

⁶ Desy Meilasari, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016", *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 170

jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Meningkatnya output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerjanya supaya produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.⁷ Atau dengan kata lain dinyatakan adanya peningkatan PDRB akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, terdapat hubungan positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja.

Dalam ukuran makro ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara pada umumnya diukur menggunakan GDP perkapita. Kenaikan GDP perkapita mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Walaupun ukuran ini memiliki banyak kekurangan akan tetapi dalam prakteknya ukuran tersebut memiliki arti penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. GDP atau *Gross Domestic Product* (pendapatan domestik bruto-PDB) diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu satu tahun dan dalam nilai mata uang domestik atau internasional.⁸

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang, dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat

⁷ *Ibid.*, hlm. 171

⁸ Chandra Utama, "Kesejahteraan Penduduk Antar Negara Diukur menggunakan GDP Perkapita dan GDP-PPP Perkapita", *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi*, Vol. 17 No. 1, 2013, hlm. 2

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi disini merupakan serangkaian cara atau usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sering kali diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian cara suatu wilayah dalam hal perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur akan lebih banyak tersedia, perusahaan semakin berkembang maju dan bertambah, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin canggih, kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat, dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.⁹

Berikut ini adalah data PDRB Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2016-2020 yang berdasarkan harga konstan:

Tabel 1.4
Data PDRB Per Kapita Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

No.	Tahun	Harga Konstan (ADHK)
1.	2016	37,395.82
2.	2017	39,537.22
3.	2018	41,749.44
4.	2019	44,052.14
5.	2020	42,550.26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2020 (data diolah)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa perekonomian Jawa Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan secara terus menerus, akan tetapi di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari tahun

⁹ Budi Suryono, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 1

sebelumnya. Yang mana terjadi penurunan sebanyak kurang lebih Rp. 1,501.88 dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Selanjutnya faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu investasi. Investasi merupakan pengeluaran pemerintah dan non pemerintah (swasta), dimana membutuhkan modal riil untuk mendirikan perusahaan baru dengan hasil keuntungan mereka dan dapat memperluas usaha yang telah ada. Sehingga dampak positifnya adalah dapat memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, juga dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari modal awal dengan menginvestasikan modalnya tersebut. Investasi khususnya pada investasi yang berorientasikan pada padat karya sehingga dapat memperluas lapangan kerja, dari pada industri padat modal yang hanya menambah modal secara terus menerus tetapi tidak berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja.¹⁰

Investasi pada sektor riil disini merupakan bentuk investasi yang dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Dalam hal ini dikarenakan perkembangan investasi di sektor riil relative memakan waktu yang cukup lama. Saat ini pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat dapat dijadikan laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, konsumsi masyarakat tidak akan mungkin naik tanpa adanya peningkatan pendapatan di sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan memperoleh pendapatan. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan di sektor riil

¹⁰ Desy Meilasari, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi ...", hlm. 171

diperlukannya investasi, baik dalam perluasan maupun investasi baru, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan produk baru sebagai antisipasi perubahan permintaan pasar. Peningkatan kapasitas produksi ini berarti sama saja dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan pekerja yang lainnya yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Maka dari itu, sudah jelas bahwa pertumbuhan pada sektor riil memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan di sektor riil tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan di sektor riil membutuhkan investasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi ini bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasikan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan berdasarkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.¹¹

Berikut ini adalah data investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020:

¹¹ Irma Mar'atus Sholihah, et. all., "Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 12

Tabel 1.5
Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	36,034,024.00
2.	2017	43,823,245.00
3.	2018	50,607,439.00
4.	2019	55,899,932.00
5.	2020	66,252,370.00

Sumber: BPS Jawa Timur 2020 (data diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tercatat di tahun 2016 hanya berjumlah Rp. 36,034,024.00, ditahun 2017 bertambah kisaran hingga 7 jutaan rupiah. Dan hampir setiap tahunnya bertambah kisaran tersebut, hanya saja ditahun 2018 ke tahun 2019 hanya bertambah 5 jutaan saja. Dan pada akhirnya di tahun 2020 mencapai Rp. 66,252,370.00.

Selanjutnya untuk faktor keempat selain faktor di atas, yang juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sering disebut dengan APBD. Dalam mengejar keberhasilan pembangunan daerah harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru. Bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pertumbuhan kuantitas dan kualitas lapangan kerja melalui usaha ekonomi padat pekerja. Menurut Simanjuntak, investasi pemerintah melalui kebijakan fiscal dan moneter harus mempertimbangkan dan memberi prioritas pada sektor ekonomi (business) yang berpotensi, misalkan pada sektor pertanian, manufaktur, makanan, dan sector jasa. Penyerahan kewenangan pemerintahan

pusat kepada daerah disertai dengan kewenangan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran.¹²

Penerimaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah uang yang masuk ke dalam kas daerah, sedangkan pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah ditunjukkan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui dan mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD yaitu: 1) rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan ekonomi daerah, 2) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah, 3) rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan

¹² Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 17 No. 1, 2018, hlm. 71

daerah dan rasio keserasian.¹³ Berikut ini adalah data APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020:

Tabel 1.6
Data APBD Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	79.609.435.502.874
2.	2017	83.659.805.425.656
3.	2018	87.930.345.048.249
4.	2019	95.637.622.963.545
5.	2020	95.166.696.358.671

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2020 (data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai APBD di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2019 selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya secara terus menerus. Akan tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar dari tahun 2019 yang awalnya mencapai nilai 95.637.622.963.545 turun menjadi 95.166.696.358.671 ditahun 2020.

Alasan dilakukan penelitian di Provinsi Jawa Timur adalah karena Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian di pulau Jawa dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi khususnya di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah industri terbesar di pulau Jawa. Jawa Timur juga merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Dimana Provinsi Jawa Timur juga mempunyai banyak sekali perusahaan yang cukup berperan dalam proses penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor industri. Dimana

¹³ *Ibid.*, hlm. 71

semakin banyak jumlah perusahaan manufaktur maka semakin banyak pula jumlah penyerapan tenaga kerja dalam proses industri. Dan selanjutnya nilai produksi juga menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah produksi merupakan jumlah keseluruhan dari hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Semakin tinggi jumlah produktivitas, maka tenaga kerjanya juga semakin tinggi dan jumlah produksinya semakin bertambah, begitupun sebaliknya. Serta jumlah upah yang diberikan jika terus meningkat, secara tidak langsung akan berdampak signifikan terhadap penawaran tenaga kerja. Karena dengan adanya peningkatan upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut, maka para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan pula jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit tersebut pengusaha secara otomatis akan menambah pula jumlah tenaga kerjanya.¹⁴

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, mengenai data UMK dan Investasi PMDN yang selalu mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun, data PDRB dan APBD yang mengalami naik turun disetiap tahunnya, serta pembahasan mengenai pengaruh yang diberikan oleh UMK, PDRB, Investasi, dan APBD terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur menjadi alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengusung judul pada penelitian ini dengan berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk**

¹⁴ Novi Rosyana dan Aris Soelistyo, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Manufaktur Besar dan Sedang Pada Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2017-2019)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 2

Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah, antara lain:

1. Besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya walaupun besarnya di setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda.
2. Laju pertumbuhan PDRB di Jawa Timur mengalami naik turun, bahkan ditahun 2020 semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Selain itu juga wilayah yang selama periode tahun 2016-2019 tetap terus mengalami kenaikan laju pertumbuhan PDRB walaupun tidak terlalu banyak.
3. Besaran jumlah Investasi di Jawa Timur mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Peningkatan investasi akan membuka atau memperluas kesempatan kerja, sehingga akan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak.
4. APBD di Jawa Timur mengalami naik turun, empat tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus akan tetapi di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Timur dimana rata-rata mengalami naik turun setiap tahunnya.

5. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur mengalami naik turun di setiap tahunnya. Rata-rata dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini terdapat pokok-pokok masalah, yaitu “Sejauh mana pengaruh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi, dan APBD terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh secara positif signifikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini paling tidak terdapat dua manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam masalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dan diharapkan dapat memperkaya ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan teori penyerapan tenaga kerja. Serta dapat membantu memberikan informasi bagi peneliti yang lainnya yang masih mempunyai ketrikatan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pemenuhan penyerapan tenaga kerja khususnya di wilayah Jawa Timur dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung. Sehingga bermanfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan sumber informasi maupun bisa menjadi fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai pihak yang hendak melaksanakan penelitian, terutama pada jalur ekonomi.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini membahas mengenai “pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi dan APBD terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur”. Adanya penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variable X terhadap variable Y, dimana variable X sebagai variable bebas (independen) yang meliputi variabel X_1 (Upah Minimum Kabupaten/Kota), variabel X_2 (PDRB), variable X_3 (Investasi), variabel X_4 (APBD), serta variabel Y terikat (dependen) yaitu ketenagakerjaan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memberikan Batasan pada penelitian ini. Batasan penelitian itu sendiri yaitu:

- a. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- b. Periode penelitian yang akan diteliti yaitu data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
- c. Pada penelitian ini dibatasi dengan variabel bebas X_1 (Upah Minimum Kabupaten/Kota), variabel X_2 (PDRB), variabel X_3 (Investasi), variabel X_4 (APBD), serta variabel Y (ketenagakerjaan).

G. Penegasan Istilah

Supaya terhindar dari kesalahfahaman nantinya, dan untuk mempermudah pembaca dalam menelaah dan memahami pokok-pokok permasalahan pada uraian yang selanjutnya nanti, maka peneliti terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan peneliti gunakan dalam judul ini adalah:

1. Definisi Konseptual

Untuk meningkatkan kemudahan pemahaman istilah **“Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur”**, disini peneliti menyediakan beberapa keterangan, diantaranya:

- a. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah adalah imbalan sebagai pihak pekerja atau buruh yang diterima dan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dasar hukum pemberian upah bagi tenaga kerja antara lain adalah:

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003.
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004: Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.¹⁵

b. PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau Provinsi adalah tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu tertentu biasanya setiap tahun. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain: (1) metode pendekatan

¹⁵ Ovi Meilina Tyas Savitri, et. all., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16 No. 2, 2019, hlm. 63

produksi, (2) metode pendekatan Produk, (3) metode pendekatan pengeluaran, (4) metode pendekatan alokasi.¹⁶

c. Investasi

Menurut Henry Faizal (2009), investasi adalah menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan. Dengan demikian, maka investasi dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Manajemen investasi makro bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Dalam hal ini dikelola adalah investasi secara nasional, baik dilakukan oleh swasta domestic dan asing, maupun dilakukan oleh publik atau negara, termasuk BUMN, BUMD, atau proyek investasi untuk sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat luas, maka lingkup manajemen investasinya juga luas meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan investasi public tersebut.¹⁷

d. APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa:

¹⁶ Djupiansyah Ganie, "Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 338

¹⁷ Wahyu Hidayah, et. all., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Samarinda", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12 No. 1, 2016, hlm.141

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.¹⁸

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sector atau unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam suatu unit usaha. Menurut Badan Pusat Statistik penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sector ekonomi.¹⁹

2. Definisi Operasional

¹⁸ Yuliasati, “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”, *E Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 161

¹⁹ Riky Eka Putra, “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 45

Secara operasional penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Definisi operasional dari penelitian “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB, Investasi dan APBD terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur” ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB, Investasi, dan APBD terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, yang mana variabel penyerapan tenaga kerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah Jawa Timur. Adapun yang menjadi indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja memiliki beberapa indikator, meliputi: perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, dan jaminan social tenaga kerja.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah Minimum Kabupaten/Kota sendiri memiliki beberapa indicator, meliputi: tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja, dan kemampuan perusahaan di setiap daerah.

c. PDRB

PDRB memiliki beberapa indikator, meliputi: tingkat kecenderungan konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*), ICOR (*Incremental capital output ratio*), rasio pembentukan modal tetap terhadap konsumsi, dan sebagainya.

d. Investasi

Investasi saham memiliki dua indikator, yaitu: Lagging dan Leading. Lagging yaitu peninjauan harga saham masa lalu agar investor mengetahui pergerakan momentum harga sekarang. Sedangkan leading merupakan indeks prediksi pergerakan harga saham di masa yang akan mendatang. Setiknya mengetahui gambaran tentang indeks stock.

e. APBD

APBD memiliki beberapa indikator, meliputi: Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang tepat waktu, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan keuangan oleh BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah skripsi, maka tentu memerlukan teknik penyusunan skripsi yang baik dan benar. Oleh karena itu peneliti menggunakan pedoman penulisan skripsi

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Untuk mempermudah dalam memahami, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan yang terdiri menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Pada bagian inti skripsi terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini sebagaimana pada penelitian yang ada pada umumnya. Di mana bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) manfaat penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini merupakan landasan teori. Di mana bab dua ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) kajian teoritis, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dalam penelitian ini merupakan metode penelitian. Di mana bab tiga ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, serta (e) teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian. Di mana pada bab empat ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) hasil penelitian, dan (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima dalam penelitian ini merupakan pembahasan. Di mana pada bab lima ini di dalamnya mencakup uraian mengenai pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam dalam penelitian ini merupakan bagian penutup yang menjadi akhir dari penelitian. Di mana pada bab enam ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) kesimpulan dan (b) saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan oleh peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.